



Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Universitas Maritim Raja Ali Haji Golongan III



Oleh :
Lia Nuraini, S.H.,M.H.
NIP. 19900723 201903 2 015

Upaya Optimalisasi Pembuatan Modul Praktik Perancangan Kontrak
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Maritim Raja Ali Haji

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM
TAHUN 2020



**LAPORAN AKTUALISASI
NILAI – NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
GOLONGAN III ANGKATAN 4**

**“UPAYA OPTIMALISASI PEMBUATAN MODUL PRAKTIK
PERANCANGAN KONTRAK PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI”**

Disusun Oleh :

Nama : Lia Nuraini, S.H.,M.H.
NIP : 19900723 201903 2 015

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM
TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM
TAHUN 2020**

**“UPAYA OPTIMALISASI PENYUSUNAN MODUL PRAKTIK
PERANCANGAN KONTRAK PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI”**

Nama : Lia Nuraini, S.H.,M.H.
NIP : 19900723 201903 2 015
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Instansi : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji
(UMRAH) Tanjungpinang
Mentor : Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
Coach : dr. Wilda Hayati, MM.

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR HASIL AKTUALISASI

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020
Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan Batam

Menyetujui,

Coach

Mentor


dr. Wilda Hayati, MM.
NIP. 19650603 199602 2 001


Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
NIP.19810929 201504 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Pada kesempatan ini, saya berterima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berperan dan memotivasi saya dalam pelaksanaan Latsar ini, diantaranya:

1. Keluarga besar saya, terutama kepada kedua orang tua dan kedua mertua, Suami dan anak saya yang selalu mendukung baik secara moril maupun materil dan mau mengorbankan waktu kebersamaan selama saya dalam mengikuti kegiatan pelatihan dasar dan aktualisasi ini.
2. Bapak Asep Zaenal Mustofa selaku Kepala Badan Pelatihan Kesehatan Batam beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III ini.
3. Ibu dr. Wilda Hayati, MM selaku *coach* saya yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini.
4. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H selaku mentor penulis yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan dalam menganalisa isu-isu yang dimuat dalam Rancangan Aktualisasi.
5. Rekan-Rekan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, terutama angkatan 4 yang telah memberikan inspirasi bagi saya.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dari rancangan ini, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan rancangan ini.

Batam, 14 Maret 2020

Lia Nuraini, S.H., M.H.
NIP. 198411202019032010

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ANALISIS ISU.....	3
1. <i>Environmental Scanning</i>	3
2. Alat Bantu Analisis	6
C. RUMUSAN ISU	9
D. IDENTIFIKASI ISU.....	9
E. ANALISIS DAMPAK.....	10
1. Bagi Individu (Dosen).....	10
2. Bagi Mahasiswa	10
3. Bagi Unit Kerja.....	10
F. RUANG LINGKUP.....	11
G. LEMBAR KONFIRMASI ISU	12
H. JUDUL AKTUALISASI.....	12
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI.....	13
A. RANCANGAN AKTUALISASI	13
1. Unit Kerja.....	13
2. Identifikasi Isu	13
3. Isu yang diangkat	13
4. Gagasan Pemecahan Isu.....	13
5. Rancangan Kegiatan	15
B. JADWAL AKTUALISASI	22
BAB III PENUTUP	36
A. Simpulan.....	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bobot Nilai APKL	7
Tabel 1.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL.....	7
Tabel 1.3 Analisis Penilaian Isu dengan USG	8
Tabel 1.4 Pengesahan <i>Coach</i> dan Mentor.....	12
Tabel 2.1 Kegiatan dan Sumber Kegiatan.....	14
Tabel 2.2 Rancangan Aktualisasi.....	15
Tabel 2.3 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi	22
Tabel 2.4 Capaian Kegiatan	28

Bapelkes Batam

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Resume Materi Agenda II dan III.....	39
Lampiran II	Profil Organisasi.....	53
Lampiran III	Data Diri Peserta, Mentor dan Coach.....	63
Lampiran IV	Lembar Pengendalian Aktualisasi Coach dan Mentor.....	64
Lampiran V	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi.....	68

Bapelkes Batam

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan pion penggerak untuk memajukan bangsa. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas berguna bagi bangsa dan negara seseorang untuk menjadi ASN akan melalui tahap-tahapan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni mengikuti serangkaian tes dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Latsar CPNS merupakan pintu gerbang yang harus dilewati oleh para CPNS sebelum menjadi PNS atau ASN. Latsar CPNS dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Salah satu profesi ASN adalah dosen pada Universitas Negeri. Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; dan

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saat ini peserta merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai dosen di prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri bersamaan dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Proses pendirian Program Studi Ilmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru ditahun 2013 mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan proses belajar mengajar.

Saat ini Program Studi Ilmu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi keempat setelah Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu Ilmu Hukum belum ada di Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini.

Peluang karir untuk sarjana hukum cukup luas karena dibutuhkan di setiap bidang yang berhadapan dengan peraturan-peraturan hukum. Untuk kamu yang ingin memilih jurusan ilmu hukum kamu dapat mengembangkan karir menjadi advokat, notaris, jaksa, hakim, dan konsultan hukum.

Sebagai program studi yang terus mengalami perkembangan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih sangat banyak isu yang harus diperbaiki di program studi ini. Salah satu isu yang sangat penting adalah belum optimalnya pengajaran dosen program studi ilmu hukum. Padahal mutu pendidikan sangat bergantung kepada kualitas pengajaran. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi secara berkala untuk mengontrol proses belajar mengajar. Dengan isu tersebut diatas, penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya penyusunan modul

praktek perancangan kontrak pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji”.

B. ANALISIS ISU

Isu merupakan suatu hal yang telah terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negative terhadap organisasi. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang diangkat berasal dari observasi dan pengalaman peserta selama masa percobaan (CPNS), tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta sebagai dosen, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kegiatan yang diinisiatif oleh peserta melalui persetujuan coach dan mentor, serta penugasan dari atasan.

Peserta merupakan seorang dosen yang mengajar S2 yang telah melaksanakan observasi di kampus khususnya FISIP UMRAH pada prodi Ilmu Hukum selama 1 (satu) tahun. Selama peserta melakukan observasi, peserta melihat beberapa isu yang terjadi di lingkungan kampus. Beberapa isu tersebut akan peserta jelaskan dibawah ini:

1. *Environmental Scanning*

Environmental Scanning adalah sikap peduli terhadap isu atau masalah dalam organisasi dan sekaligus bentuk kemampuan memetakan hubungan kausalitas yang terjadi. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik organisasi dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan defenisi tersebut, isu merupakan suatu hal yang terjadi baik didalam maupun diluar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi bahkan dapat berlanjut pada tahap krisis. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang diangkat berasal dari hasil observasi dan pengalaman penulis selama masa percobaan (CPNS), tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penulis sebagai dosen, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kegiatan yang diinisiatif oleh peserta melalui persetujuan coach dan mentor, serta penugasan dari atasan.

Beberapa isu yang ada, akan dijelaskan serta akan dikaitkan dengan agenda 3 (tiga) yaitu mengenai Manajemen ASN, Pelayanan Publik, *Whole of Government*, isu tersebut yaitu:

- a. Belum optimalnya penggunaan aplikasi syarah dalam proses belajar-mengajar Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Menjawab tantangan zaman di era 4.0 Universitas Maritim Raja Ali Haji mengembangkan aplikasi syarah yang merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk memudahkan proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa dalam hal penginputan bahan ajar yang bisa diakses dosen dan mahasiswa pengampu mata kuliah, proses tatap muka pertemuan dengan metode daring dan evaluasi perkuliahan online. Namun penggunaan aplikasi ini belum secara optimal diterapkan atau digunakan baik bagi dosen maupun mahasiswa di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali haji. Hal ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

- b. Belum adanya modul perkuliahan praktek peradilan perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Mata kuliah praktek peradilan perdata merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa, mata kuliah praktek peradilan perdata ini memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk bisa berpraktek sebagai praktisi dalam peradilan perdata, mulai dari prosedur pengajuan gugatan hingga pada putusan hakim, namun di prodi Ilmu hukum saat ini belum ada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) maupun modul praktek peradilan perdata sehingga menyulitkan dosen yang merupakan tim teaching pengampu perkuliahan prakterk peradilan untuk menselarakan program pembelajaran dalam satu semester sehingga memberikan keseragaman ilmu dalam mata kuliah praktek peradilan perdata bagi mahasiswa. Hal

ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

- c. Belum adanya modul mata kuliah hukum waris Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Merupakan mata kuliah wajib di prodi Ilmu hukum agar mahasiswa memahami pengertian dan bisa membandingkan hukum waris baik dari hukum waris perdata barat, maupun waris menurut hukum Islam, namun di prodi Ilmu hukum belum ada modul hukum waris sehingga menyulitkan bagi dosen untuk pengampu mata kuliah yang sama untuk menyamakan bahan ajar dan mahasiswa pun sulit untuk mencari bahan terkait hukum waris agar bisa mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen. Hal ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

- d. Belum optimalnya modul praktek perancangan kontrak Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Dengan mempelajari hukum perancangan kontrak mahasiswa mampu untuk menganalisa dan membuat berbagai kontrak hukum. Sejalan dengan visi misi prodi ilmu hukum yang ingin menyiapkan mahasiswa tamatan prodi ilmu hukum yang siap untuk bekerja, perancangan kontrak sangat diperlukan karena dapat mengasah *skill* dan pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dalam menganalisis kontrak. Di bidang perancangan kontrak dan perkembangan hukum kontrak terus mengalami kemajuan dari masa ke masa sehingga diperlukan modul praktek perancangan kontrak sehingga tidak hanya teori hukum kontrak melainkan juga praktek perancangan kontrak harus dikuasai oleh mahasiswa ilmu hukum untuk di terapkan langsung. Di prodi ilmu hukum belum ada modul praktek perancangan kontrak yang mengarahkan pembelajaran pada praktek langsung pembuatan kontrak sehingga mahasiswa banyak yang hanya menguasai teori. Hal ini terkait

dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

- e. Belum adanya modul mata kuliah hukum perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang..

Mata kuliah hukum perdata wajib diambil oleh mahasiswa semester II, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa sebelum dapat mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Agar mahasiswa memahami konsep dasar hukum perdata yang merupakan ranah hukum privat. Namun di prodi ilmu hukum belum ada modul hukum perdata sehingga masing-masing dosen tidak seragam dalam penyampaian materi hukum perdata. Hal ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN.

2. Alat Bantu Analisis

Penilaian isu untuk menentukan isu mana yang menjadi prioritas untuk dicarikan solusinya berdasarkan identifikasi isu sebelumnya. Proses penilaian isu menggunakan alat bantu yaitu berdasarkan APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) dan USG (Urgency, Seriousness, Growth) secara bertahap. Tahap pertama penilaian isu dengan menggunakan APKL, selanjutnya 3 isu terpilih di lakukan penilaian lagi dengan menggunakan USG.

1. APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) Kriteria pertama APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan Layak artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Rentang penilaian yang digunakan pada APKL adalah dengan memberikan skor 1-5, semakin tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.

Table 1.1 Bobot Penilaian APKL

BOBOT	KETERANGAN
1	Sangat kurang pengaruhnya
2	Kurang pengaruhnya
3	Sedang pengaruhnya
4	Kuat pengaruhnya
5	Sangat kuat pengaruhnya

Dari kriteria APKL berdasarkan isu, maka dilakukan penilaian yang diangkat menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Adapun hasil penilaian terlihat dalam tabel berikut:

Table 1.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL

No	Isu	Kriteria				Total Skor	Prioritas
		A	P	K	L		
1	Belum optimalnya penggunaan aplikasi syarah dalam proses belajar-mengajar Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	3	3	3	3	12	I
2	Belum adanya modul perkuliahan praktek peradilan perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	3	5	5	5	18	II
3	Belum adanya modul mata kuliah hukum waris Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	3	3	3	4	13	V
4	Belum optimalnya modul praktek perancangan kontrak Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	5	5	5	5	20	V

5	Belum adanya modul mata kuliah hukum perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	3	3	4	4	14	III
---	---	---	---	---	---	----	-----

Kriteria kedua adalah USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merujuk pada seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menekankan pada seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Rentang penilaian yang digunakan pada matriks USG adalah dengan memberikan skor 1-5, sama halnya dengan APKL, semakin tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.

Table 1.3 Analisis Isu Menggunakan Kriteria USG

No	Isu	Kriteria			Total Skor	Prioritas
		U	S	G		
1	Belum optimalnya penyusunan modul mata kuliah praktek perancangan kontrak Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	5	5	5	15	I
2	Belum adanya modul perkuliahan praktek peradilan perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	3	5	5	13	II
3	Belum adanya modul mata kuliah hukum perdata Prodi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.	4	4	4	12	V

Setelah dilakukan analisis menggunakan APKL dan USG, maka didapatkan *core isu* dengan melihat ranking yang paling tinggi, yaitu isu nomor satu.

C. RUMUSAN ISU

Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan kriteria APKL dan USG, isu yang paling tepat diangkat sebagai rancangan aktualisasi yaitu tentang **“Belum Optimalnya Upaya Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.”**

D. IDENTIFIKASI SUMBER ISU

Penggunaan modul adalah salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mahasiswa. Sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri, modul diharapkan dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, tuntas, dan dengan hasil yang berkualitas.

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena didalamnya telah dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung.

Selama proses CPNS melakukan menjadi dosen di Prodi Ilmu hukum terdapat beberapa permasalahan yang salah satu paling utama adalah belum optimalnya modul praktek perancangan kontrak dalam proses pembelajaran. Sehingga kurang mengasah keterampilan/kemahiran mahasiswa prodi Ilmu hukum untuk membuat suatu kontrak.

Dengan adanya permasalahan ini, maka judul yang akan diangkat yaitu Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam hal ini, akan dirancang draft modul yang akan dibuat yang mana setelah adanya modul ini dapat meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam berpraktek pembuatan kontrak.

Core issu pada tulisan ini terkait dengan pembelajaran agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yakni Manajemen ASN karena termasuk kedalam jenis manajemen ASN karena menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur Sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pembuatan modul praktek perancangan kontrak yang sesuai dengan perkembangan hukum kontrak akan menunjukkan sumber daya ASN sebagai dosen yang berkualitas.

E. ANALISIS DAMPAK

Dampak yang ditimbulkan jika permasalahan ini tidak diselesaikan, yaitu:

1. Bagi Individu (Dosen)

Dampak yang ditimbulkan untuk seorang dosen sendiri, kesulitan untuk mencari bahan referensi dalam pengajaran dengan menggunakan metode praktik.

2. Bagi Rekan Kerja

Dampak yang ditimbulkan jika isu ini tidak diselesaikan maka akan berdampak pada proses belajar mengajar tidak adanya keselarasan antar sesama dosen pengampu mata kuliah.

3. Bagi Mahasiswa

Dampak yang ditimbulkan jika masalah ini tidak diselesaikan, maka mahasiswa akan kesulitan mencari referensi yang akan mereka pelajari secara mandiri, dan pada proses pembelajaran didalam kelas mahasiswa banyak yang tidak fokus kepada penjelasan dosen.

4. Bagi Unit Kerja

Dampak yang terjadi Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka tidak dapat memberi sumbangsih dalam penambahan penilaian untuk akreditasi prodi.

Dampak Positif

1. Dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas pribadi sebagai dosen dalam proses pembelajaran dengan sistem praktik.
2. Adanya keselarasan dan kesepahaman yang sama sesama dosen pengampu mata kuliah.
3. mahasiswa mudah mencari referensi yang akan mereka pelajari secara mandiri.

4. Jika masalah ini diselesaikan, maka dapat memberi sumbangsih dalam penambahan penilaian untuk akreditasi prodi.



F. RUANG LINGKUP

Rancangan aktualisasi ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, yang dikenal dengan ANEKA. Dalam kegiatan yang sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan di Unit kerja. Aktualisasi dilaksanakan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kegiatan aktualisasi dilakukan dalam 5 kegiatan yaitu:

- 1) Menyampaikan ide gagasan terkait pembuatan modul perancangan kontrak kepada pimpinan (dekan);
- 2) Mengumpulkan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang pembuatan modul perancangan kontrak;
- 3) Melakukan audiensi dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak;
- 4) Menyusun dan evaluasi draf modul praktek perancangan kontrak; dan
- 5) Mengesahkan modul praktek perancangan kontrak dan upload di website prodi Ilmu Hukum.

G. LEMBAR KONFIRMASI ISU

Table 1.4 Pengesahan Coach dan Mentor

PERSETUJUAN COACH DAN MENTOR	
Tanggal : 2020	
Coach	Mentor
 dr. Wilda Hayati, MM. Widyaiswara Ahli Madya NIP. 19650603 199602 2 001	 Dr. Oksep Adhavanto, S.H., M.H. Dekan FISIP UMRAH NIP.19810929 201504 1 002

H. JUDUL AKTUALISASI

Berdasarkan analisis, rumusan dan identifikasi isu maka judul yang akan diangkat adalah “Upaya Optimalisasi Pembuatan Modul Praktek Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji”.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

1. Unit Kerja

Program Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

2. Identifikasi Isu

Hal ini menjadi permasalahan adalah proses belajar mengajar pada mata kuliah Hukum Perancangan Kontrak yang menjadi kurang spesifik dikarenakan belum optimalnya Modul Praktik Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH. Sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai literatur penunjang agar tidak membingungkan mahasiswa.

Hal ini berkaitan dengan agenda 3 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI tentang Manajemen ASN karena menghasilkan kualitas yang mencerminkan professional, memiliki nilai dasar dan etika profesi.

3. Isu yang diangkat

Belum Optimalnya penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum.

4. Gagasan Pemecahan Isu

Untuk solusi dari isu yang diangkat, maka dirancanglah Modul Praktik Perancangan Kontrak pada Program studi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kegiatan dan Sumber Kegiatan

No	Kegiatan	Sumber Kegiatan
1	Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor	Kreatifitas
2	Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak	Kreatifitas
3	Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak	Kreatifitas
4	Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak	SKP
5	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak	SKP

Tabel 2.2. Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor	<p>1.1. Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi</p> <p>1.2. Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati</p>	<p>Maksud dan tujuan tersampaikan</p> <p>Notulen saran dan masukan dari mentor</p>	<p>Dalam Menyampaikan gagasan dan ide kepada atasan disampaikan dengan senyum, sapa, salam dan berkoordinasi dengan sopan (etika Publik) secara professional dan tidak menyalahi aturan (Manajemen ASN)</p> <p>Dalam melakukan konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh kejelasan (Komitmen Mutu)</p>	<p>Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset</p>	<p>Mencerminkan nilai komitmen dan profesional (kredibel), transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam program studi ilmu hukum</p>

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
		1.3. Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang serta mendokumentasikan pertemuan tersebut	Persetujuan dan dukungan didapat	Saat mencatat saran dari atasan atau mentor akan dilakukan secara profesional (etika publik) dan mengikuti arahan dari pimpinan terkait sistem yang akan dibuat (manajemen ASN) koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government)		
2.	Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak	2.1. Mencari standar/acuan dalam membuat modul	Kumpulan dokumen Standar/acuan dalam pembuatan modul	Dalam proses mencari standar/acuan dalam membuat sistem standar nasional penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan (akuntabilitas) dan dengan tetap memperhatikan kualitas yang baik dalam penyusunan modul praktik perancangan kontrak (komitmen mutu)	Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset	Mencerminkan nilai keteraturan kerja, profesional, integritas, dimana mengumpulkan literatur/standar tentang penyusunan modul sesuai dengan nilai-nilai yang ada di prodi ilmu hukum
		2.2. Mengumpulkan literatur terkait praktek perancangan kontrak di perpustakaan	Daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak	Dalam proses pengumpulan literatur terkait perancangan kontrak di perpustakaan dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilistas) dilakukan dengan kerja		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
				keras (Anti Korupsi) dan mencari dari berbagai sumber (Komitmen Mutu)		
		2.3 Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktek perancangan kontrak	Peta konsep modul praktek perancangan kontrak	Dalam proses pembuatan peta konsep modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan kerja keras (Anti Korupsi) dan efisien (Komitmen Mutu)		
3.	Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak	3.1. Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Maksud dan tujuan tersampaikan	Saat mengundang rekan menggunakan bahasa yang sopan (Etika publik), penuh tanggung jawab (akuntabilitas)	Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis	Kegiatan ini menunjukkan nilai transparansi, berorientasi mutu dan kejelasan target

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
		3.2. Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Diskusi terlaksana	Diskusi dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak dilakukan dengan pikiran yang terbuka pada kritik dan saran (Nasionalisme) saling menghargai hak berpendapat (Etika Publik) dan kejelasan target (akuntabilitas)	kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset	dalam Prodi Ilmu Hukum
		3.3. Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Notulen hasil FGD	Membuat hasil kesimpulan FGD dengan cermat (Akuntabilitas), jujur (anti korupsi) dan penuh kejelasan (komitmen mutu)		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
		3.4. Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak	Maksud dan tujuan tersampaikan, hal ini dibuktikan dengan : foto	Dalam melakukan konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh kejelasan (Komitmen Mutu)		
4.	Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak	4.1. Membuat bahan seminar	Bahan seminar siap	Menyusun bahan seminar modul praktek perancangan kontrak dengan didasari oleh inovasi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu), sopan (etika publik) dan Peyusunan modul dilakukan dengan kerja keras, disiplin dan jujur (Anti-korupsi)	Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 1 yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dengan keiman-an, teknologi dan ketawaqwa-an serta memiliki ketarampilan yang memadai, yang mampu bersaing ditingkat regional.	Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, akuntabel, sinergi, tranparan dan kreatif.
		4.2. Pelaksanaan Seminar	Seminar dilaksanakan dibuktikan dengan foto	Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejelasan target (Akuntabilitas) selanjutnya didasari oleh efisiensi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu) dan		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
				dilakukan dengan kerja keras, disiplin dan jujur (Anti-korupsi)		
		4.3. Membuat laporan hasil pelaksanaan seminar dan menyampaikan ke atasan	Laporan pelaksanaan seminar siap	Dalam membuat laporan pelaksanaan seminar modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan tanggung jawab,kejelasan target (Akuntabilitas) kerja keras (Nasionalisme) dan efektifitas, orientasi mutu (Komitmen Mutu).		
5.	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak	5.1. Membuat angket untuk evaluasi modul praktik perancangan kontrak	Angket siap	Mempersiapkan modul dengan efektif dan efisien (pelayanan public) berorientasi mutu (komitmen mutu).	Bahan sosialisasi siap yang dibuktikan dengan : foto dan video	Mencerminkan nilai komitmen mutu, profesional, koordinasi dalam Prodi Ilmu hukum
		5.2. Membuat laporan evaluasi modul	Laporan evaluasi modul praktik	Dalam membuat laporan modul dilakukan dengan kejelasan target (Akuntabilitas) dan		

No	Kegiatan	Tahap Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Substansi Materi Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
		praktik perancangan kontrak	perancangan kontrak siap	transparansi (Pelayanan Publik) meningkatkan kinerja ASN (Manajemen ASN) serta sopan dan hormat (Etika Publik)		
		5.3 Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak	Persetujuan atasan	Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul dilakukan dengan sopan dan santu (etika public) tepat waktu (akuntabilitas) sesuai dengan berorientasi mutu (komitmen mutu) musyawarah mufakat , menghargai pendapat orang lain (Nasionalisme) koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government)		

JADWAL

B. JADWAL AKTUALISASI

Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 2 Juni 2020 Jadwal kegiatan aktualisasi disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.3.
Jadwal Kegiatan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT / HASIL	Rencana Aktualisasi					Pelaksanaan Aktualisasi											
				Maret	April				Maret	April				Mei				Juni		
				IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		
1	Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor	1. Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi	Maksud dan tujuan tersampaikan	23- 24						23										
		2. Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati	Notulen saran dan masukan dari mentor	26-27						24										
		3. Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang penyusunan modul serta	Persetujuan dan dukungan didapat	26-27						24										

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT / HASIL	Rencana Aktualisasi					Pelaksanaan Aktualisasi										
				Maret	April				Maret	April				Mei				Juni	
				IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
		mendokumentasikan pertemuan tersebut																	
2	Pengumpulan berbagai literatur terkait tentang modul perancangan kontrak	1. Mencari standar/acuan dalam membuat modul	Kumpulan dokumen Standar/acuan dalam pembuatan modul	30-31						30									
		2. Mengumpulkan literatur terkait praktek perancangan kontrak di perpustakaan	Daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak		1-3					30	1								
		3. Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktek perancangan kontrak	Peta konsep modul praktek perancangan kontrak		6-7						2-3								
3	Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu	1. Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Maksud dan tujuan tersampaikan			8						20-21	22-24						

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT / HASIL	Rencana Aktualisasi					Pelaksanaan Aktualisasi									
				Maret	April				Maret	April				Mei				Juni
				IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
	mata kuliah praktik perancangan kontrak	2. Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Diskusi terlaksana			9-10							27					
		3. Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak	Notulen hasil FGD			13-14								27				
		4. Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak	Maksud dan tujuan tersampaikan, hal ini dibuktikan dengan : foto			13-14								4				
4	Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak	1. Membuat bahan evaluasi	Bahan seminar siap				15-17							5-8	8-12			

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT / HASIL	Rencana Aktualisasi					Pelaksanaan Aktualisasi									
				Maret	April				Maret	April				Mei				Juni
				IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
		2. Pelaksanaan Seminar	Seminar dilaksanakan dibuktikan dengan foto				18								13-14	15		
		3. Membuat laporan pelaksanaan hasil seminar dan menyampaikan ke atasan	Laporan hasil seminar siap				20									18-20		
5	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak	1. Evaluasi modul praktek perancangan kontrak	Angket siap					21									22	
		2. Membuat laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak	Laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak siap					22									26-29	
		3. Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak	Persetujuan atasan.					23										2

C. CAPAIAN KEGIATAN

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan I

Kegiatan / Tahapan Kegiatan	<p>Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi 2. Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati 3. Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan modul serta mendokumentasikan pertemuan tersebut 	
Tanggal Pelaksanaan	<p>Tanggal Rancangan Aktualisasi 23- 27 Maret 2020</p>	<p>Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 23 – 27 Maret 2020</p>
Deskripsi Kegiatan dan Teknik Aktualisasi Penerapan Nilai Dasar ASN	<p>Pertemuan dengan Atasan bertujuan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari pimpinan/mentor yang dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi, . Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati dalam proses ini disampaikan dengan senyum, sapa, salam dan berkoordinasi dengan sopan (etika Publik) secara profesional dan tidak menyalahi aturan (Manajemen ASN), Mencatat saran dari atasan atau mentor tentang pembuatan modul serta mendokumentasikan pertemuan tersebut. mengatur jadwal pertemuan dengan Atasan terlebih dahulu melalui sekretaris dengan menerapkan nilai dasar ASN yaitu efektif dan efisien dimana adanya ketepatan jadwal pertemuan disesuaikan agenda atasan(Komitmen Mutu). Setelah jadwal telah ditentukan, pada saat pertemuan, datang tepat waktu menemui atasan termasuk nilai tanggungjawab yaitu ketepatan disiplin waktu(Akuntabilitas) dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan nilai moral yang mana kewajiban untuk melakukan kebaikan atau sebagaimana mestinya(Etika Publik). Kemudian melakukan konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh kejelasan (Komitmen Mutu). Saat mencatat saran dari atasan atau mentor akan dilakukan secara profesional (etika publik) dan mengikuti arahan dari pimpinan terkait sistem yang akan dibuat (manajemen ASN) koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government)</p>	

Nilai - nilai Dasar yang Relevan	Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Manajemen ASN dan Whole Of Government.
Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Pertemuan dengan Atasan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari mentor atau atasan yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni, visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset
Penguatan Nilai Organisasi	Mencerminkan nilai komitmen dan profesional (kredibel) ,transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam program studi ilmu hukum
Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan tersampaikan 2. Notulen saran dan masukan dari mentor 3. Persetujuan dan dukungan atasan didapat
Manfaat / Hasil Capaian	<p>Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan yakni Dekan mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan peserta latsar. 2. Dekan memberikan bimbingan dan arahan terkait penyusunan modul 3. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 4. Mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari Unit Kerja. 5. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS.
Analisa Dampak Jika Nilai Aneka Tidak Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka salah satunya sikap sopan dan santun, bahasa yang baik maka tidak akan terbangun komunikasi yang baik. 2. Dekan selaku mentor tidak mengetahui kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan peserta latsar. 3. Dekan tidak memberikan bimbingan dan arahan pada pelaksanaan pembuatan modul. (Ini melanggar nilai Akuntabilitas karena menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab.)
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi. (Ini melanggar nilai Nasionalisme karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta Etika Publik karena tidak menunjukkan sopan santun.

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan II

Kegiatan / Tahapan Kegiatan	Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak 1. Mencari standar/acuan dalam membuat modul 2. Mengumpulkan literatur terkait praktek perancangan kontrak di perpustakaan 3. Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktek perancangan kontrak	
Tanggal Pelaksanaan	Tanggal Rancangan Aktualisasi 30 Maret – 07 April 2020	Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 30 Maret – 03 April 2020
Deskripsi Kegiatan dan Teknik Aktualisasi Penerapan Nilai Dasar ASN	Pada awalnya dilakukan kegiatan pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahap yakni : mencari standar/acuan dalam membuat modul yang dilakukan melalui penelusuran dengan media internet yang dalam tahapan ini akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan (Akuntabilitas) dan dengan tetap memperhatikan kualitas yang baik dalam penyusunan modul praktik perancangan kontrak (Komitmen mutu). Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pengumpulan literatur terkait praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan penulisan literatur di perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dalam proses ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas) dilakukan dengan kerja keras (Anti Korupsi) dan mencari dari berbagai sumber (Komitmen Mutu). Dan langkah selanjutnya dilakukan pembuatan peta konsep draf pembuatan modul praktik perancangan kontrak agar isi dari modul lebih terarah dan terkonsep yang dalam proses ini dilakukan dengan kerja keras (Anti Korupsi) dan efisien (Komitmen Mutu).	
Kendala	Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 pelayanan perpustakaan ditutup sehingga peserta harus menunggu jadwal pembukaan perpustakaan agar bisa melakukan berbagai tahapan sesuai yang direncanakan.	
Nilai - nilai Dasar yang Relevan	Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak terwujud nilai Akuntabilitas, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi	

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Pengumpulan berbagai literatur terkait modul perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni, visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset
Penguatan Nilai Organisasi	Mencerminkan nilai keteraturan kerja, profesional, integritas, dimana mengumpulkan literatur/standar tentang penyusunan sebagaimana nilai-nilai yang terdapat di prodi ilmu hukum
Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kumpulan dokumen Standar/acuan dalam pembuatan sistem nasional 2 Daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak 3 Peta konsep modul praktek perancangan kontrak
Manfaat / Hasil Capaian	<p>Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pedoman penulisan modul dibuat sesuai standar nasional 2. Peserta mendapatkan daftar judul buku dan pengarang terkait perancangan kontrak 3. Peserta dapat membuat peta konsep modul praktik perancangan kontrak
Analisa Dampak Jika Nilai Aneka Tidak Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dalam pencarian standar acuan pembuatan modul, maka modul tidak terarah dan kurang berkualitas 2. Jika peserta tidak mendapatkan daftar judul buku maka modul yang dihasilkan sulit untuk dipertanggungjawabkan karena tidak berasal dari sumber yang valid (ini melanggar nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) 3. Peserta sulit untuk membuat peta konsep modul praktik perancangan kontrak 4. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.

Tabel

2.4. Capaian Kegiatan III

Kegiatan / Tahapan Kegiatan	<p>Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak 2. Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak 3. Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktek perancangan kontrak 4. Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak 	
Tanggal Pelaksanaan	<p>Tanggal Rancangan Aktualisasi 08 – 14 April 2020</p>	<p>Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 20 April – 04 Mei 2020</p>
Deskripsi Kegiatan dan Teknik Aktualisasi Penerapan Nilai Dasar ASN	<p>Pada saat dilakukan kegiatan Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak</p> <p>Tahap awal yang dilakukan adalah mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan (Etika Publik) dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas), selanjutnya pelaksanaan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak dan didalam proses ini dilakukan dengan pikiran yang terbuka pada kritik dan saran (Nasionalisme) saling menghargai hak berpendapat (Etika Publik) dan kejelasan target (akuntabilitas). Tahap berikutnya ialah membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan cermat (Akuntabilitas), jujur (anti korupsi) dan penuh kejelasan (komitmen mutu). Dan tahap terakhir pada kegiatan ini ialah Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan mendengarkan pendapat (Nasionalisme), serta menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun (etika publik) mandiri, jujur (Anti Korupsi) dan penuh kejelasan (Komitmen Mutu).</p>	

Kendala	Berhubung adanya kondisi penyebaran wabah virus Covid-19 di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji menerapkan sistem WFH (<i>Work From Home</i>) sehingga FGD hanya dapat dilakukan melalui media daring yakni <i>Zoom</i> .
Nilai - nilai Dasar yang Relevan	Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan bahwa kegiatan Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak terwujud nilai Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.
Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni, visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini menunjukkan nilai transparansi, berorientasi mutu dan kejelasan target dalam Prodi Ilmu Hukum
Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak tersampaikan 2. Diskusi terlaksana 3. Notulen hasil FGD 4. Maksud dan tujuan tersampaikan, hal ini dibuktikan dengan : foto
Manfaat / Hasil Capaian	<p>Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mendapatkan masukan dari rekan-rekan sejawat dalam pembuatan modul praktik perancangan kontrak 2. Peserta mendapatkan informasi terupdate terkait materi modul praktik perancangan kontrak 3. Peserta dapat membuat modul praktik perancangan kontrak yang bermutu
Analisa Dampak Jika Nilai Aneka Tidak Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka seperti Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. dalam Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak, maka FGD tidak akan terlaksana dengan baik 2. Peserta sulit untuk membuat materi modul praktik perancangan kontrak dengan informasi terbaru 3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan IV

Kegiatan / Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak 1. Membuat bahan seminar 2. Pelaksanaan seminar 3. Membuat laporan pelaksanaan hasil seminar dan menyampaikannya ke atasan	
Tanggal Pelaksanaan	Tanggal Rancangan Aktualisasi 15 April – 20 April 2020	Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 5 - 20 Mei 2020
Deskripsi Kegiatan dan Teknik Aktualisasi Penerapan Nilai Dasar ASN	Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, tahap awal peserta membuat bahan seminar yang dalam proses ini disusun bahan seminar modul praktek perancangan kontrak dengan didasari oleh inovasi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu), sopan (etika publik) dan Peyusunan modul dilakukan dengan kerja keras, disiplin dan jujur (Anti-korupsi). Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan seminar kepada mahasiswa yang dalam proses ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejelasan target (Akuntabilitas) selanjutnya didasari oleh efisiensi yang berorientasi mutu (Komitmen mutu) dan Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi. Kemudian membuat laporan pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak yang dilakukan dengan tanggung jawab,kejelasan target (Akuntabilitas) kerja keras (Nasionalisme) dan efektifitas, orientasi mutu (Komitmen Mutu).	
Kendala	Dikarenakan masa pandemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan seminar secara langsung kepada mahasiswa dan harus dilakukan secara daring yang mana terkadang terkendala oleh gangguan sinyal mahasiswa saat melakukan daring.	

Nilai - nilai Dasar yang Relevan	Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni, visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset
Penguatan Nilai Organisasi	Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan nilai organisasi yaitu profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan kreatif.
Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan seminar siap 2. Seminar dilaksanakan dibuktikan dengan foto 3. Laporan hasil seminar siap
Manfaat / Hasil Capaian	Manfaat dari melakukan penggalangan dukungan kepada Atasan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengetahui manfaat pembuatan modul praktik perancangan kontrak 2. Mahasiswa mudah memahami materi perkuliahan praktik perancangan kontrak 3. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 4. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS.
Analisa Dampak Jika Nilai Aneka Tidak Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi maka tidak akan tersampaikan maksud dari pembuatan modul praktik perancangan kontrak kepada mahasiswa karena kualitas yang kurang bagus dari modul praktik perancangan kontrak tersebut. 2. Mahasiswa sulit memahami isi dari modul praktik perancangan kontrak 3. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.

Tabel 2.4. Capaian Kegiatan V

Kegiatan / Tahapan Kegiatan	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan pelaksanaan hasil seminar dan menyampaikannya ke atasan 2. Membuat laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak 3. Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak 	
Tanggal Pelaksanaan	Tanggal Rancangan Aktualisasi 21 - 23 April 2020	Tanggal Pelaksanaan Aktualisasi 22 Mei – 2 Juni 2020
Deskripsi Kegiatan dan Teknik Aktualisasi Penerapan Nilai Dasar ASN	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan yakni, tahap awal peserta Membuat angket untuk evaluasi modul praktik perancangan kontrak dengan mempersiapkan modul dengan efektif dan efisien (Pelayanan public) berorientasi mutu (Komitmen mutu). Langkah berikutnya dilakukan pembuatan laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak yang dalam membuat laporan modul dilakukan dengan kejelasan target (Akuntabilitas) dan transparansi (Pelayanan Publik) meningkatkan kinerja ASN (Manajemen ASN) serta sopan dan hormat (Etika Publik). Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak yang dalam proses ini dilakukan dengan sopan dan santu (Etika publik) tepat waktu (Akuntabilitas) sesuai dengan berorientasi mutu (Komitmen mutu) musyawarah mufakat , menghargai pendapat orang lain (Nasionalisme) koordinasi dan kolaborasi (Whole of Government).	
Kendala	Dikarenakan masa pandemi Covid-19 peserta tidak dapat melakukan penyebaran angket secara langsung untuk evaluasi modul sehingga harus dilakukan secara daring. Dan kordinasi kepada atasan juga terhambat karena harus mengikuti jadwa WFH (<i>Work From Home</i>)	
Nilai - nilai Dasar yang Relevan	Berdasarkan teknik dan capaian aktualisasi yang berhasil dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan modul praktek perancangan kontrak bahwa terwujud nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Whole of Government	

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Evaluasi modul praktek perancangan kontrak yang sejalan dengan visi misi prodi Ilmu Hukum yakni, visi Prodi Ilmu Hukum yaitu : menjadi program studi ilmu hukum yang unggul berbasis kemaritiman di tingkat nasional dan Misi Prodi ilmu hukum yang ke 2 yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset
Penguatan Nilai Organisasi	Mencerminkan nilai komitmen mutu, profesional, koordinasi dalam Prodi Ilmu hukum
Output Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angket siap 2. Laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak siap 3. Persetujuan atasan
Manfaat / Hasil Capaian	<p>Manfaat dari melakukan Evaluasi modul praktek perancangan kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modul yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan mahasiswa 2. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas dan dapat diterima. 3. Pengamalan nilai-nilai dasar PNS.
Analisa Dampak Jika Nilai Aneka Tidak Dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila tidak diterapkan nilai Aneka yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Whole of Government maka modul yang dibuat peserta menjadi tidak jelas dan sulit dipahami mahasiswa 2. Peserta sulit menyelesaikan tiap tahapan kegiatan aktualisasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari *core issue* yang telah ditetapkan adalah “Belum Optimalnya Penyusunan Modul Praktek Perancangan Kontrak di Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ”. Berdasarkan isu tersebut peserta memberi judul Aktualisasi ini ***Upaya Optimalisasi Penyusunan Modul Praktik Perancangan Kontrak di Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.***

Melalui kegiatan aktualisasi ini peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil (PNS) sebagai berikut:

- 1) Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor, nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah etika public karena pada saat berkonsultasi dan meminta saran serta persetujuan dari pimpinan harus bersikap sopan dan santun juga menggunakan Bahasa yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan akan memudahkan atasan dalam memahami maksud dan tujuan peserta; serta menerapkan akuntabilitas, komitmen mutu, Nasionalisme dan *Whole of Government*.
- 2) Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu karena dalam pembuatan modul praktik perancangan kontrak haruslah memperhatikan kualitas dan dapat dijamin kebenarannya sesuai dengan aturan yang berlaku; serta menerapkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi.
- 3) Pelaksanaan FGD dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah akuntabilitas, dalam melakukan diskusi dengan rekan kerja sejawat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kejelasan target yang ingin dicapai, dan dilakukan dengan cermat; serta diterapkan nilai nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi.
- 4) Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak, nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah komitmen mutu, karena dalam pelaksanaan seminar harus dilakukan dengan berorientasi pada mutu sesuai

dengan aturan berdasarkan prinsip keahlian untuk mencapai hasil dan mendorong kinerja peserta; serta menerapkan etika publik, nilai anti korupsi dan akuntabilitas

- 5) Evaluasi modul praktek perancangan kontrak, nilai yang paling dominan untuk diterapkan adalah pelayanan public karena modul yang telah siap dilakukan evaluasi dengan prinsip transparansi karena dapat diketahui baik oleh pimpinan, rekan kerja maupun mahasiswa nantinya.

B. Saran

Saran yang didapat dari laporan hasil aktualisasi ini adalah:

- 1) Bagi Peserta.

Peserta dapat menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam setiap pelaksanaan tugas dan menjadi contoh di lingkungan tempat kerja, serta memberikan motivasi bagi diri sendiri untuk melanjutkan pembuatan karya tulis baik berupa modul, bahan ajar, maupun jurnal ilmiah.

- 2) Bagi Rekan Kerja.

Dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak dapat menerapkan nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi sehingga tercipta pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas sebagai dosen.

- 3) Bagi Organisasi.

Aktualisasi ini dapat memberikan sumbangsih dalam penambahan penilaian untuk meningkatkan akreditasi prodi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Akuntabilitas: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Nasionalisme: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Etika Publik: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Komitmen Mutu: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Anti Korupsi: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Manajemen ASN: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Pelayanan Publik: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Whole of Government*: *Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negar

Lampiran I

Resume Materi II dan III

Nama: Lia Hurnani

Angkatan IV

Akuntabilitas PNS

Tujuan Pembelajaran :

1. memahami nilai - nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisarkannya .
2. mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat
3. Memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi
4. melayani masyarakat secara adil dan merata
5. menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu
6. menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten
7. mengaktualisasikan nilai - nilai dasar akuntabilitas.

Pengertian Akuntabilitas

↳ kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai - nilai publik. nilai - nilai publik yaitu :

1. mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi ;
2. memiliki pemahaman dan keradaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis
3. memperlakukan warganegara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik .
4. menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan .

Aspek - Aspek Akuntabilitas

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
 - ↳ hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu / kelompok / instuti dengan negara dan masyarakat . Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
 - ↳ Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggungjawab, adil dan inovatif
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
 - ↳ laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan hasil yang telah dicapai oleh individu / kelompok / institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
 - ↳ konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
 - ↳ untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini proses setiap individu / kelompok / institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

Pentingnya Akuntabilitas

- ▶ PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparial dan berintegritas
- ▶ Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level / unit organisasi yang merupakan kewajiban laporan kegiatan kepada atarannya.

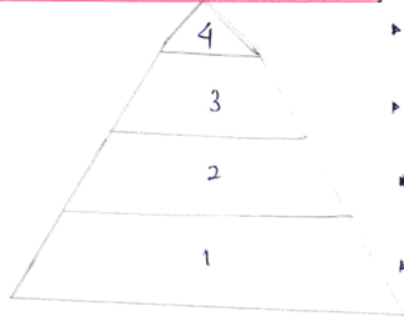
3 Fungsi utama akuntabilitas publik :

- a. Untuk menyediakan kontrol demokrasi (peran demokrasi) dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas.
- b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
- c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal.

- Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luar.

Tingkatan dalam Akuntabilitas



- ▶ Akuntabilitas Stakeholder
- ▶ Akuntabilitas Kelompok
- ▶ Akuntabilitas Individu
- ▶ Akuntabilitas Personal

Akuntabilitas Personal

➤ Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika.

• Akuntabilitas Individu, mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungannya.

• Akuntabilitas kelompok, pembagian kewenangan dan semangat kerjanya yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

• Akuntabilitas Organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.

• Akuntabilitas stakeholder, stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran dan kritik terhadap kinerjanya.

MENJADI PNS YANG AKUNTABEL

A. Indikator Keberhasilan

UU No. 5 tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kerejahan.

B. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Perilaku Individu

c. Perilaku berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi

D. Menghindari Perilaku yang curang dan koruptif

E. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya Negara

F. Perilaku berkaitan dgn Penyimpangan & penggunaan Data serta Informasi Pemerintah⁴¹

G. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan.

Nama : Lia Nuraini Nasionalisme

Angkatan IV

Nasionalisme secara politis => manifestasi kesadaran nasional

Nasionalisme Pancasila => pandangan / paham ketintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai - nilai Pancasila.

• Nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi yg dibenteng individu

∴ Tujuan Pembelajaran

ASN

→ memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Nilai - nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2)

- a. Pemahaman dan Implementasi Nilai - Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan Tugasnya.
- b. Pemahaman dan Implementasi Nilai - nilai kemanusiaan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa

- ✓ Percaya & taqwa kepada Tuhan YME
- ✓ saling menghargai pemeluk agama dan kepercayaan
- ✓ memiliki kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan
- ✓ tidak memakrakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain.
- ✓ mencintai makhluk Tuhan.

2) Nilai - nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 3 s/d sila 5)

- a. Pemahaman dan Implementasi nilai - nilai ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pemahaman dan Implementasi nilai - nilai kemanusiaan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.
- c. Pemahaman dan Implementasi nilai - nilai keadilan sosial bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

3) ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik.

- a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik
- b. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik.
- c. ASN berintegrasi tinggi

- d. Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik
- 4. ASN sebagai Pelayan Publik
 - a. ASN Profesional
 - b. ASN yang melayani Publik
 - c. ASN Berintegritas Tinggi
 - d. Implementasi ASN Profesional dan melayani yang berintegritas tinggi.
- 5. ASN sebagai Perikat dan Pemersatu Bangsa
 - a. ASN sebagai pemersatu bangsa
 - b. ASN menjaga kondisi damai
 - c. Peran ASN dalam menciptakan kondisi Damai.

Sila ke -2 (kemanusiaan yang adil dan beradab)

- ✓ mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia
- ✓ mengakui harkat dan martabat manusia
- ✓ menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- ✓ memperlakukan manusia secara adil dan beradab
- ✓ mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain
- ✓ mendorong kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.

Sila ke-3 (Persatuan Indonesia)

- ✓ mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan kerelamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi /golongan.
- ✓ sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- ✓ mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa ~~apabila diperlukan~~
- ✓ mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
- ✓ memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial
- ✓ mengembangkan persatuan Indonesia atas bhinneka Tunggal Ika
- ✓ memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila ke -4 (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan)

- ✓ kedaulatan negara ada ditangan rakyat
- ✓ manusia Indonesia warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama
- ✓ musyawarah untuk mencapai ⁴³ mufakat dengan semangat kekeluargaan

✓ mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan .

Sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

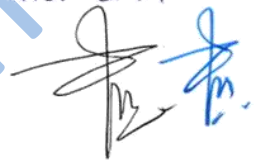
✓ mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

✓ melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai masalah sosial

✓ Bersikap adil dan suka memberi pertolongan

✓ mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara

✓ cinta kemajuan dan pembangunan bangsa, material dan spiritual.



Bapelkes Batam

Nama : Lia Nuraini
Latsar CPNS
Angkatan IV
UMRAH

ETIKA PUBLIK
Oleh : dr. Desy Ariani G., M. BIOMED .

INDIKATOR HASIL BELAJAR

01. Memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik
02. Mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya ;
03. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama Diklat .

PENGERTIAN ETIKA

ETHOS (Yunani) - watak, Adat istiadat , kebiasaan .

∴ Menurut Bertenr (2000)

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat .

∴ Menurut Kementerian PAN RI (2006)

↳ Etika sebagai nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, tindakan ataupun ucapannya

∴ Menurut Ricoeur (1990)

↳ Etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil .

∴ Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan . .

PENGERTIAN KODE ETIK

- Kode Etik adalah aturan - aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandanganya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan - ketentuan tertulis
- kode etik Profesi adalah aturan - aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu .

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi.
2. cermat dan disiplin
3. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan
4. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku
5. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan / pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah.
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
7. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan
9. memberikan informasi secara benar & tidak menyesatkan kepada pihak lain
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat / mencari keuntungan
11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
12. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN

PEMBENTUKAN ETIKA

- ↳ sangat dipengaruhi
 - Pola didik keluarga
 - Budaya masyarakat
 - Adat istiadat
 - kebiasaan
 - lingkungan

Tuntutan etika publik dan kompetensi

- Pengetahuan tentang hukum
 - manajemen program
 - manajemen strategis
 - manajemen sumber daya
- } kompetensi Teknis
- ✓ Manajemen nilai
 - ✓ kemampuan penalaran moral
 - ✓ moralitas pribadi
 - ✓ etika organisasional
- } kompetensi etika

Fungsi Etika

1. sebagai ukuran baik buruk, wajar, dan benar-salah
2. landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional
3. Untuk menjalankan visi dan misi lembaga / institusi

SUMBER ETIKA

1. Agama
2. lingkungan masyarakat umum
3. Peraturan-peraturan formal
4. lingkungan ketetanggaan
5. lingkungan keluarga
6. Hati nurani individual

sambungan ... Tuntutan Etika Publik dan kompetensi

- penilaian dan penetapan tujuan
 - keterampilan manajemen
 - gaya manajemen
 - kepemimpinan politik dan organisasi
- 46 kompetensi leadership

BENTUK BENTUK KODE ETIK DAN IMPLIKASINYA

1. Pentingnya etika dalam urusan publik
2. Penggunaan kekuasaan : legitimasi kebijakan
3. konflik kepentingan
4. sumber-sumber kode etik bagi ASN
5. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik

PENTINGNYA ETIKA DALAM URUSAN PUBLIK

- Etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia
- Etika mendorong tumbuhnya moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki
- Etika memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai yang hakiki bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia

SUMBER - SUMBER KODE ETIK PNS

1. PP Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang kedaulatan Rakyat, Aparatur bertanggungjawab kepada Rakyat, A
2. PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil. Manajemen negara yang efektif dan efisien.
3. PP Nomor 30 Tahun 1980
4. PP Nomor 42 Tahun 2004
5. PP Nomor 53 Tahun 2010
6. UU Nomor 5 Tahun 2014
7. Kode Etik Administrasi Publik (ASPA, 1981)

Etika Pemerintahan

(UU no. 28 Tahun 1999)

Azat - azas umum penyelenggaraan pemerintahan

- kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- kepentingan umum
- keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas



Nama : Lia Nuraini
Angkatan IV

Komitmen Mutu

- Peserta mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovatif dan kinerja yang berorientasi mutu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu

1. konsep efektivitas
 - ↳ sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya.
 - Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.
2. efisiensi organisasi
 - ↳ jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional.
3. konsep Inovasi
 - ↳ Inovasi barang dan jasa adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi dan persaingan.
 - ↳ inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dgn tuntutan perubahan lainnya.

- Konsep Dasar dan Pengertian Mutu
- mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.
- mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk / jasa sejenis lainnya, yang diharikan oleh lembaga lain sebagai pesaing.
- organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi, sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu.

Nilai - nilai Dasar Orientasi mutu

1. manajemen mutu

Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.



Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu di atas, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja ~~be~~ individual maupun kinerja organisasional.

Beberapa Teknik / metode perbaikan mutu

- metode Plan do Check Act (PDCA)
 - Plan (Perencanaan) identifikasi permasalahan
 - Do (melaksanakan) rencana aksi yang telah disusun
 - check (pemeriksaan) apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan ²⁹ semestinya ?

Nilai - nilai Dasar Orientasi mutu

menurut Zeithmalh :

- 1) Tangible (nyata /berwujud)
- 2) Reliability (kehandalan)
- 3) Responsiveness (cepat tanggap)
- 4) Competence (kompetensi)
- 5) Access (kemudahan)
- 6) Courtesy (keramahan)
- 7) Communication (komunikasi)
- 8) Credibility (kepercayaan)
- 9) Security (keamanan)
- 10) Understanding the customer (Pemahaman pelanggan)

Implementasi mutu dalam layanan publik

cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari ASN kepada publik antara lain :

- memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan Institusi
- memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya
- merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan
- memahami karakter pelanggan yang akan dilayani
- memahami karakter pelanggan menguasai teknik pelayanan Prima
- melayani dengan hati
- menerima kritik dan saran untuk perbaikan kedepan
- Dasar hukum UU No. 5 /2014 tentang ASN Pasal 10, 11, 12

Pendekatan Inovatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan Pemerintahan merupakan keharusan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur

2) Upaya peningkatan produktivitas PNS

- Peningkatan kompetensi
- motivasi
- penegakan disiplin
- pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan

Nama : Lia Nuraini

Angkatan : IV

Latsar CPNS

Anti Korupsi

Tujuan Mata kuliah anti korupsi :

Diharapkan peserta mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi dilingkungannya.

Pendahuluan

- Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang artinya kerusakan, kebrobrokan, dan kebusukan.
- korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa

Dampak Perilaku dan Tindak Pidana korupsi

1. Negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar
2. Harga infrastruktur lebih tinggi
3. Tingkat korupsi yang lebih tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan
4. korupsi menurunkan investasi dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi
5. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing
6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak dari pada negara rentan korupsi

Pengertian korupsi

- Tindak Pidana korupsi

→ Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan keralahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

- 7 jenis korupsi (syed Husein Alatas)

1. korupsi Transaktif, korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut
2. korupsi ekstraktif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai

3. Korupsi Invertif, korupsi yang ~~menguntungkan~~ melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi Nepotistik, korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. Korupsi Autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
6. Korupsi Suportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain.
7. Korupsi Defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

• Tindak Pidana korupsi menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari : 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap-menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP (Paral 1 ayat 1 sub e UU No 3/71)

Faktor penyebab terjadinya korupsi

- a. Penegak hukum tidak konsisten
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang
- c. Langkanya lingkungan anti korupsi
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
- e. Kemiskinan, keserakahan
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi
- h. Budaya permisif/serba membolehkan
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika
- j. Sadar Anti korupsi

Spiritual Accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik

Nama Lia Nuraini

Manajemen ASN

Angkatan IV

ASN mempunyai peran yang penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator manajemen ASN :

- menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN
- menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN
- menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN

Pertama, perubahan dari pendekatan personel administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management yang menganggap adalah SDM dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai dan dikembangkan dengan baik.

Kedua, perubahan dari pendekatan closed career system yang mengedepankan kompetisi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan.

Dasar dalam manajemen ASN

↳ UU no 5 tahun 2014 tentang ASN

Aparatur sipil negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai ASN (PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian) terdiri dari :

- 1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK)

Jenis Status & Kedudukan ASN

Jenis → PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)

→ PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)

Status

1. Berstatus pegawai tetap dan memiliki NP secara nasional } PNS
2. Menduduki jabatan pemerintahan

1. diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU } PPPK
2. melaksanakan tugas pemerintahan

Kedudukan

1. Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara } PNS
2. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
3. Harus bebas dari pengaruh / intervensi golongan dan partai → P3K politik

• Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik

• Kedudukan ASN berada di Pusat, Daerah dan luar negeri, namun demikian Pegawai ASN merupakan satu kesatuan.

Peran ASN

Fungsi

(Ps 10 UU No. 5/14)

- =>
- a. pelaksana kebijakan publik
 - b. pelayan publik
 - c. perekat dan pemersatu bangsa

Tugas

(Ps 11 UU No 5/14)

- =>
- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
 - c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

Peran

(Ps 12 UU no 5/14)

- => Sebagai perencana, pelaksana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik profesional, bebas dan intervensi politik.

Nama : Lia Nuraini

Angkatan : 4

Pelayanan Publik

UU No. 25 Tahun 2009

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Unsur penting dalam pelayanan publik

1. organisasi penyelenggara pelayanan publik
2. penerima layanan
3. kekuatan pelayanan

Bentuk Pantologi birokrasi

- Penggelembungan organisasi
- Duplikasi tugas dan fungsi
- Red tape
- konflik kewenangan
- kkn
- enggan berubah

Prinsip-prinsip pelayanan prima

1. Responsif
2. Membangun visi dan misi pelayanan
3. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai
4. menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan
5. Memberikan apresiasi kepada pegawai

Etika Pelayanan oleh ASN

- Sikap / perilaku
- Ekspresi wajah
- Penampilan
- cara berpakaian
- cara berbicara
- cara mendengarkan
- cara bertanya

Etika dasar yang dilakukan oleh ASN

- Politenes
- respect full
- ~~attn~~ attentive
- coor perative
- tolerance
- informality
- self control

Prinsip - prinsip pelayanan publik

- ✓ Partisipatif
- ✓ Transparan
- ✓ Tidak diskriminatif
- ✓ mudah dan murah
- ✓ efektif dan efisien
- ✓ Responsif
- ✓ ~~aksesibel~~ aksesibel
- ✓ akuntabel
- ✓ berkeadilan

Pola pikir ASN sebagai pelayan publik profesional, bebas dan intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Permasalahan pelayanan publik

1. Biayanya mahal
2. Prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit - belit
3. Pemberi layanan yang tidak ramah
4. Diskriminatif
5. Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan
6. Tidak transparan
7. Tidak responsif
8. Praktik KKN

R/3/3

Nama : Lia Nuraini
Angkatan 4

Whole Of Government

Mengenal WOG

- WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.
- WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama.
- Pentingnya WOG
 1. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
 2. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan.
 3. Upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama.

Praktek WOG

cara pendekatan WOG :

1. Penguatan koordinasi antar lembaga.
2. membentuk lembaga koordinasi khusus
3. membentuk gugus tugas
4. koalisi sosial

Tantangan dalam Praktek WOG

1. Kapasitas (SDM dan Institusi)
2. Nilai dan Budaya Organisasi
3. Kepemimpinan

Praktek WOG dalam Pelayanan Publik

1. Pelayanan yang bersifat administratif
2. Pelayanan Jasa
3. Pelayanan barang
4. pelayanan regulatif.

Pelayanan Publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan:

1. Pola Pelayanan teknis Fungsional
2. Pola Pelayanan satu atap
3. pola pelayanan satu pintu
4. Pola Pelayanan Terpusat
5. Pola Pelayanan Elektronik

Prasyarat Best Practices

1. Budaya dan Filosofi
2. Cara kerja yang baru
3. Akuntabilitas dan Insentif
4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan

Keuntungan WOG

Outcomes - Focused

Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh k/L sektoral secara masing - masing

Boundary - spanning

Implementary kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi

Strengthening Prevention

WOG mendorong percepatan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh

Enabling

WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks.

WOG

- Pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif antar sector guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik
- Wog juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu Pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan - urusan yang relevan.

Lampiran II

Profil Organisasi

A. Profil Organisasi

Menjadi Universitas di Garis depan Negeri ini, kemudian berbatas langsung dengan negara tetangga memacu kami Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk mewujudkan FISIP UMRAH sebagai Pusat Pendidikan Ilmu Sosial & Ilmu Politik yang Unggul di kawasan Regional serantau ini, yaitu Selat malaka.

Tak dapat dipungkiri bahwa Letak Geografis Kepri memungkinkan UMRAH terlebih lagi FISIP UMRAH untuk bersentuhan langsung dengan dunia internasional melalui Laut. Hal ini juga memacu kami untuk lebih meningkatkan kapasitas dan Kemampuan para Pendidik dan Peneliti di FISIP UMRAH, terutama kepada kajian-kajian mengenai perbatasan laut, Kebijakan Pemerintah Kepulauan, Manajemen Pembangunan Kepulauan. Sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari UMRAH yang memiliki Fokus dan Konsen terhadap Kemaritiman, kami berusaha mengintegrasikan Nuasa Maritim dalam kurikulum kami di lima Jurusan yang ada, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Sosiologi, Jurusan Ilmu Hukum, dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji berdiri bersamaan dengan 8 program studi baru di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Proses pendirian Program Studi Ilmu Hukum dimulai sejak tahun 2009 dan baru ditahun 2013 mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan proses belajar mengajar.

Saat ini Program Studi Ilmu Hukum masih berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Program Studi keempat setelah Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara dan Sosiologi. Ke depan seluruh civitas akademika akan berupaya untuk menjadikan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu Program Studi yang dinanti kehadirannya di Universitas Maritim Raja Ali Haji mengingat jenjang Strata Satu Ilmu Hukum belum ada di Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini.

Program Studi Ilmu Hukum memiliki spesifikasi keilmuan yang berbasis pada pengembangan terhadap wilayah perbatasan sesuai dengan kondisi geografis Provinsi

Kepulauan Riau yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Keunggulan kompetitif yang akan diciptakan melalui Program Studi Ilmu Hukum ini adalah mahasiswa yang memiliki wawasan internasional dalam perspektif daerah perbatasan. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dimodifikasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam persaingan dunia kerja global yang memiliki keahlian teoritis dan praktis. Selain itu juga, Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji diselaraskan dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang lebih menekankan kepada keunggulan keilmuan yang berbasis kepada dunia internasional. Kemudian dari pada itu untuk jumlah keseluruhan SKS pada Program Studi Ilmu Hukum berjumlah 144 Sks dan sudah termasuk dalam Mata Kuliah Pilihan yang berjumlah 12 Sks.

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dirancang untuk pertama kali pada tahun 2013. Pada tahun 2015 telah diadakan perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Peraturan ini mengamanatkan bahwa Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi di level 6 (enam).

Setelah berlaku hampir lima tahun Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2015 yang berlaku sampai dengan saat ini, memerlukan kajian dan masukan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, berdasarkan surat arahan Rektor Nomor B/1400/UN53.01/KR.00.01/2019, yang menindaklanjuti hasil Rakornas para Rektor dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahwa Program Studi diminta agar melakukan penyesuaian dan revisi kurikulum program studi yang mengacu pada peningkatan bidang keilmuan untuk memenuhi kebutuhan era revolusi industri 4.0. Selain itu, dalam surat tersebut, Rektor mengarahkan agar Program Studi juga menyesuaikan kurikulum dengan Kebijakan UMRAH 5.0 dengan mengimplementasikan pembelajaran dengan metode *blended learning*.

Untuk memenuhi arahan sebagaimana dimaksud di atas, Tim Penyusun mengadakan Workshop Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UMRAH dengan mengundang para pengguna lulusan Ilmu Hukum (*stakeholder*) terkait guna menjangkau informasi mengenai kebutuhan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan. Kegiatan dimaksud diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, tepatnya tanggal 1

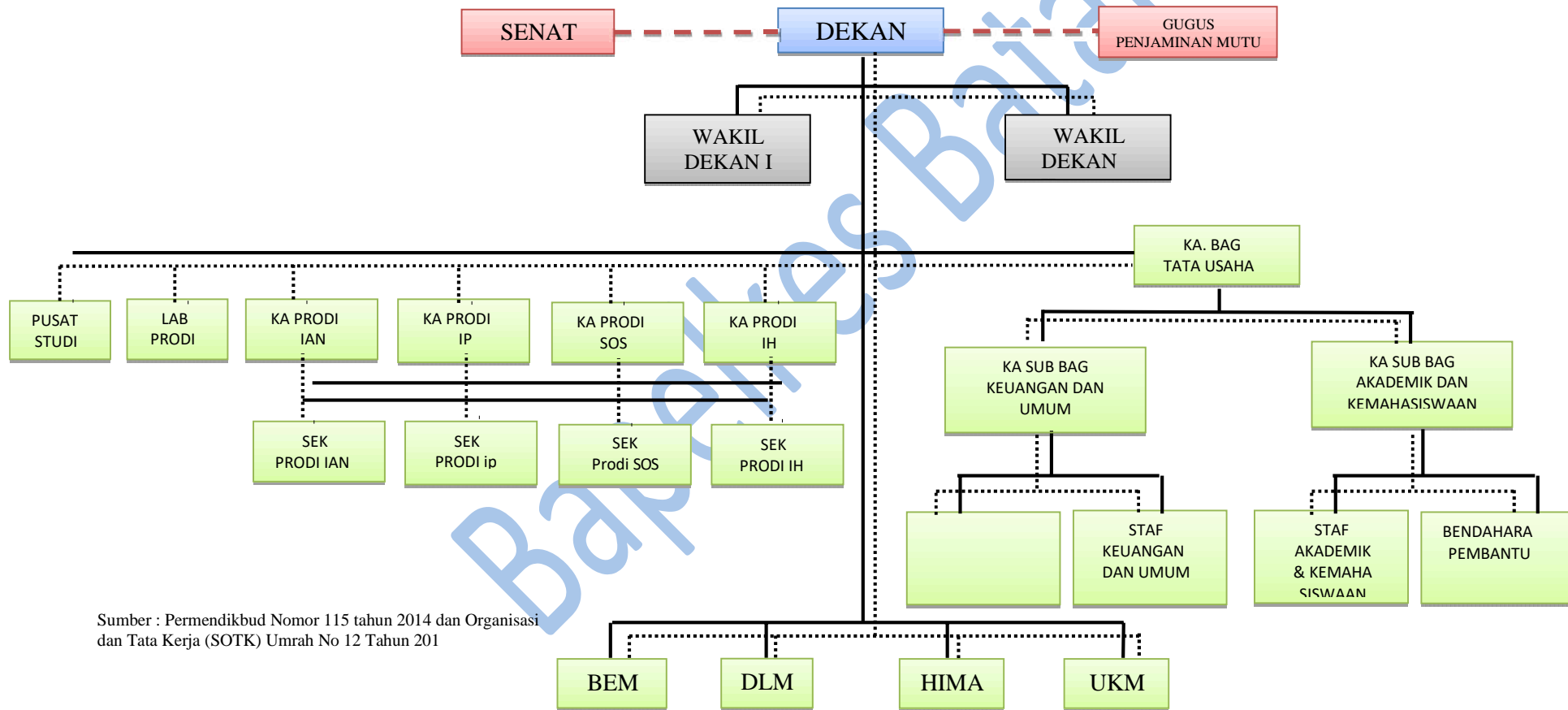
dan 2 Juli 2019 yang diadakan di Ruang Rapat Program Studi Ilmu Hukum UMRAH Dompok. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi/lembaga yang terkait dengan pengguna lulusan hukum, diantaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang, LANTAMAL IV Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para pengguna lulusan, pimpinan Fakultas Hukum dan Guru Besar di bidang Maritim, diharapkan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UMRAH dapat selaras dengan VISI UMRAH sebagai Kampus Maritim dan dan juga dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

**Gambar gedung Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang Kepulauan Riau**



Struktur Organisasi Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau



Sumber : Permendikbud Nomor 115 tahun 2014 dan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Umrah No 12 Tahun 201

B. Visi, Misi, Motto dan Tata Pamong

Visi

“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum Berbasis Maritim Unggul di Tingkat Nasional Tahun 2035”.

Unggul berbasis Kemaritiman, artinya bahwa Program Studi Ilmu Hukum menjadi pusat pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis kemaritiman, hal ini didasarkan pada kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah maritim dengan luas wilayah 96% perairan dan hanya 4% daratan. Sebagai salah satu Program Studi Ilmu Hukum yang berbasis kemaritiman di Indonesia, diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Unggul di tingkat Nasional Tahun 2035, artinya bahwa Program Studi Ilmu Hukum menjadi Program Studi yang unggul pada pengembangan bidang ilmu hukum yang berbasis kemaritiman di tahun 2035.

Misi Program Studi Ilmu Hukum

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan ilmu hukum yang ditopang dengan keimanan, teknologi dan ketakwaan serta memiliki keterampilan praktek yang memadai yang mampu bersaing di tingkat regional;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengetahuan ilmu hukum yang berlandaskan pada riset;
3. Mengembangkan pengetahuan ilmu hukum berbasis kemaritiman;
4. Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Program Studi Ilmu Hukum

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan hukum yang handal dan inovatif sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Menata sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal.
3. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi terselenggaranya proses eksplorasi potensi dan kreativitas mahasiswa.

Visi UMRAH

Menjadi universitas terkemuka di Indonesia berbasis kemaritiman

Misi UMRAH

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, dan Indonesia pada umumnya;
2. Mengadakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya;
3. Melaksanakan penelitian untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang kemaritiman;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;

Tata Pamong

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam

universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk didalamnya adalah bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas dalam mengelola program studi.

Sistem tata pamong di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) ditetapkan melalui STATUTA UMRAH, dan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UMRAH dan sejumlah aturan pelaksana yang berupa SK Rektor, SK Dekan, aturan di Prodi, dan SK dari Satker lainnya di lingkungan UMRAH.

Sistem tata pamong FISIP UMRAH ditetapkan melalui mekanisme yang disepakati bersama, dengan mengakomodir semua unsur, fungsi, dan peran yang ada di fakultas. Sistem tata pamong dibangun secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dengan sasaran untuk dapat menciptakan budaya organisasi yang mencerminkan aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

1. Kredibel

Aspek kredibel pada FISIP UMRAH dicerminkan dalam sistem rekrutmen pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dan tata cara pemilihan serta pengangkatan pimpinan dan pejabat struktural lainnya di lingkungan UMRAH. Dalam tata cara tersebut ditetapkan mengenai persyaratan- persyaratan yang dapat menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki kredibilitas yang dapat mengupayakan perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi.

Dalam hal rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di UMRAH sejak tahun 2012 sudah melakukan rekrutmen secara nasional melalui skema penerimaan PNS¹. Dengan pola seperti ini bisa diyakinkan bahwa kredibilitas dalam hal rekrutmen bisa terjaga, karena mengikuti standar yang telah dibuat oleh negara.

Kemudian untuk rekrutmen tenaga kontrak, dalam hal penilaian aspek psikologis UMRAH bekerjasama dengan pihak ketiga yang profesional dalam hal melakukan asesmen psikologi. Hal ini dilakukan agar proses rekrutmen tersebut benar-benar mengedepankan objektivitas.

2. Transparansi

Aspek transparansi pada FISIP UMRAH meliputi beberapa hal berikut :

a. Proses rekrutmen Dosen dan Pegawai.

Dalam hal rekrutmen Dosen dan Pegawai berdasarkan aturan pola rekrutmen PNS, karena sejak tahun 2012 UMRAH menjadi universitas negeri. Mulai tahun 2013 hingga saat ini pola rekrutmen Dosen dan Pegawai di UMRAH mengikuti pola dan standar yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan rekrutmen PNS. Proses rekrutmen ini di mulai dari usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja di UMRAH yang di sampaikan ke Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan (BUPK), kemudian Rektor menyampaikan usulan kebutuhan tersebut kepada kementerian. Setelah ada ketetapan dari kementerian, maka akan dilakukan pengumuman rekrutment secara nasional melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

b. Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural.

Proses pemilihan pimpinan dan pejabat struktural di UMRAH berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal yang ada di UMRAH. Khusus untuk pengisian jabatan yang merupakan tugas tambahan bagi dosen dilakukan secara demokratis. Untuk pemilihan Rektor dipilih oleh senat universitas, untuk pemilihan dekan dilakukan oleh senat fakultas, sedangkan Prodi dilakukan melalui rapat dosen di Prodi. Sedangkan pengisian ketua lembaga dan UPT ditunjuk oleh pimpinan sesuai tingkatan. Semua mekanisme ini tertuang dalam Statuta UMRAH dalam Permendikbud Nomor 115 tahun 2014 dan Permendikbud No 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UMRAH.

Untuk pengisian jabatan struktural bagi tenaga kependidikan juga dilakukan berpedoman pada aturan kementerian dan aturan internal

yang ada di UMRAH. Sejak tahun 2014 proses pengisian jabatan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga terutama pada hal penilaian psikologi.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Transparansi dalam hal pendanaan dan anggaran dicerminkan melalui proses penyusunan RKAKL, yang dimulai masing-masing satuan kerja atau unit kerja, kemudian dikonsolidasikan ditingkat fakultas melalui Musrenbang Fakultas, dan selanjutnya dibahas di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat universitas. Pada tiap tahapan, baik pada tahap penyusunan ditingkat prodi, fakultas dan universitas semuanya melibatkan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan tanpa terkecuali. Sejak tahun 2014 sudah ada pola pembagian PNB yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal antara Universitas dengan Fakultas dengan pola 40 : 60.

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan. Proses transparansi ini dimulai dari proses pembagian dan sosialisasi Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) semua unit di fakultas. Tujuan dari pembagian RKAKL ini adalah bagian dari proses keterbukaan informasi dan akses, kemudian langkah berikutnya adalah dengan membuat rencana kerja pelaksanaan program atau kegiatan satu tahun (*timetable programe*). Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan Nomor 3010/UN53.1/TU/2015.

e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.

Transparan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan adanya SOP ini maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program ini berlaku sama di FISIP UMRAH. Hal ini diatur

dalam Standar Operasional Prosedur yang tertuang dalam SK Dekan Nomor 3010/UN53.1/TU/2015.

f. Proses pelayanan

Transparan dalam proses pelayanan di FISIP UMRAH tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pelayanan bidang akademik dan kemahasiswaan sebanyak 26 SOP, pelayanan umum dan kepegawaian sebanyak 21 SOP. Dengan adanya SOP ini maka mekanisme, alur, persyaratan dan waktu pelayanan di FISIP UMRAH lebih jelas dan terukur.

3. Akuntabel

Aspek akuntabel di FISIP UMRAH dicerminkan melalui tata cara pertanggung jawaban setiap unsur yang ada pada FISIP UMRAH. Mekanisme pelaksanaan aspek akuntabilitasnya berupa penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan di FISIP UMRAH oleh panitia pelaksana. Bahkan setiap periode tertentu dan akhir tahun anggaran, setiap panitia pelaksana kegiatan diminta untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rapat fakultas. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan RKAKL di tahun yang akan datang. Selain jadwal tahunan, dalam setiap rapat bulanan juga dibahas tentang capaian dan realisasi anggaran dari masing-masing unit.

4. Bertanggungjawab

Aspek pertanggungjawaban di FISIP UMRAH dicerminkan dalam pelaksanaan tugas oleh setiap unsur program studi, baik pejabat struktural, dosen, maupun tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut setiap unsur di fakultas berkewajiban melaporkan setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Kemudian laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan beban pekerjaan masing-masing dan sesuai dengan amanah yang diberikan. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diharuskan untuk mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik.

Lampiran III

Data Diri Peserta, Mentor Dan Coach

Biodata Peserta

Nama : Lia Nuraini, S.H., M.H.
NIP : 199007232019032015
Golongan : III b
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Juli 1990
Alamat : Jln. Ganet Perum. Ganet Center Blok C No.8
Nomor HP : 085278947775
E-Mail : lianuraini23@umrah.ac.id
Unit Kerja : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Biodata Mentor

Nama : Dr. Oksep Adhayanto, SH.,M.H.
NIP : 198109292015041002
Unit Kerja : Universitas Maritim Raja Ali Haji
Golongan : III d Penata Tingkat I
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Biodata Coach

Nama : dr. Wilda Hayati, MM
NIP : 196506031996022001
Unit Kerja : Bapelkes Batam
Golongan : IV b Pembina Tingkat 1
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya

Lampiran IV

Lembar Pengendalian Coach







FORMULIR PENGENDALIAN OLEH COACH

Latihan Dasar CPNS UMRAH Golongan III Angkatan IV Tahun 2020

Nama peserta	: LIA NURAINI, S.H.,M.H.		
Instansi	: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI		
Tempataktualisasi	: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI		
No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	5 Maret 2020	1. Menerima arahan dari <i>Coach</i> 2. Menyampaikan 5 isu yang ditemukan dari <i>environmental scanning</i> kepada <i>coach</i> 3. Meminta arahan <i>coach</i> dalam memilih <i>core issue</i>	f
2	6 Maret 2020	Menerima arahan dari <i>coach</i> mengenai penulisan laporan rancangan aktualisasi	f
3	14 Maret 2020	Konsul Revisi Bab 1,2 dan 3 melalui <i>email</i>	f
4	16 Maret 2020	Konsul revisi Bab 1,2 dan 3 perbaikan penulisan	f
5	16 Maret 2020	ACC Rancangan Aktualisasi	f

FORMULIR PENGENDALIAN OLEH MENTOR



Latihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan III Tahun 2020

Nama peserta		: LIA NURAINI, S.H.,M.H.	
Instansi		: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	
Tempat aktualisasi		: UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	
No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	4 Maret 2020	1. Konsul bagaimana untuk mengangkat sebuah isu	
2	4 Maret 2020	1. Konsul tentang isu-isu yang terdapat di Lapangan 2. Judul isu yang akan diangkat	
3	8 Maret 2020	1. Konsul Bab 1 2. Konsul Bab 2 a. Nilai-nilai Dasar PNS b. Kedudukan dan Peran PNS	
4	14 Maret 2020	1. Konsul Revisi Bab 1 a. Penulisan b. Pola Dasar Penyelenggaraan c. Identifikasi Isti d. Analisis isu dengan AKP dan USG 2. Konsul Bab 2 : Perbaikan Penulisan 3. Konsul Bab 3 a. Jenis Kegiatan	
5	16 Maret 2020	1. Konsul Revisi Bab 1-3 : a. Perbaikan Penulisan b. Revisi Rancangan Kegiatan 2. Konsul Revisi Bab 1-4	
6	16 Maret 2020	ACC Rancangan Aktualisasi	

Lembar Pengendalian Mentor

FORM PENGENDALIAN MENTOR

Nama : Lia Nuraini, S.H.,M.H.
 Unit Kerja : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Universitas Maritim Raja Ali Haji
 Mentor : Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.

No.	NAMA KEGIATAN	CATATAN MENTOR	WAKTU DAN MEDIA MENTORING
1	Konsultasi terkait penyusunan modul kepada pimpinan atau mentor. Tahapannya : 1. Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi 2. Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati 3. Mencatat saran dari atasan atau mentor serta mendokumentasikan pertemuan tersebut. Output/hasil : Maksud dan tujuan tersampaikan, notulen	- Konsultasi terkait dgn kepanitiai/ selip notulen - Diskusi dgn dosen yg sama bidang hukum	29-3-2020  Tatap Muka
2	Penyusunan draf modul praktik perancangan kontrak Tahapannya : 1. Mencari standar/acuan dalam membuat modul praktik perancangan kontrak 2. Mengumpulkan literature terkait praktik perancangan kontrak di perpustakaan 3. Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktik perancangan kontrak Output/hasilnya: Kumpulan dokumen standar/acuan pembuatan modul,	- Konsultasi terkait perancangan penyusunan modul dgn bule mannie terkait modul	1-4-2020  Tatap Muka

	<p>3. Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak.</p> <p>Output/hasilnya : Angket, laporan evaluasi modul praktik perancangan kontrak, persetujuan atasan.</p>	<p>pada implementasi</p>	
--	--	--------------------------	--

Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

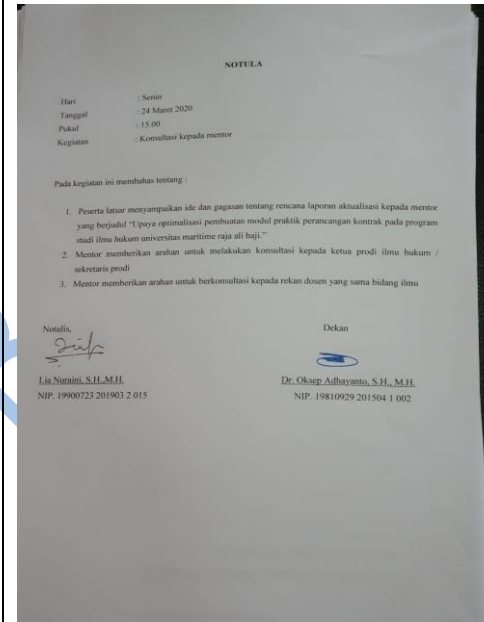
Lampiran Kegiatan 1

Judul Kegiatan : Penyampaian ide gagasan terkait penyusunan modul praktik perancangan kontrak kepada pimpinan

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
1	Menghubungi atasan atau mentor untuk mengatur waktu konsultasi			24 Maret 2020

2.

Melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor sesuai jadwal yang telah disepakati



24 Maret 2020

Baper

Mencatat saran dari atasan atau mentor serta mendokumentasikan pertemuan tersebut



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Dompok Telp. (0771) 4500089 Fax. (0771) 4500091
PO.BOX 155 Tanjungpinang 29111
Website: <http://umrah.ac.id> Email: fspra@umrah.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
2. NIP : 19810929 201504 1 002
3. Jabatan : Dekan FISIP UMRAH
4. Instansi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Selaku atasan dari

1. Nama : Lia Nuraini, S.H., M.H
2. NIP : 19900723 201903 2 015
3. Jabatan : Dosen Asisten Ahli
4. Instansi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Menyatakan telah menyetujui dan mendukung pelaksanaan Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dengan judul "Optimalisasi Pembuatan Modul Praktik Perancangan Kontrak Pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji".

Tanjungpinang, 25 Maret 2020

Yang Menyatakan
Dekan FISIP UMRAH





Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.
NIP. 19810929 201504 1 002

25 Maret 2020

Lampiran Kegiatan 2

Judul Kegiatan : Pengumpulan berbagai literatur terkait acuan/standar tentang modul mata kuliah Perancangan Kontrak

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
1	Mencari acuan/standar dalam membuat modul			30 Maret 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
			<p style="text-align: center;">PANDUAN PENGARUAN USULAN PROGRAM INSENTIF BUKU AJAR TERBET TAHUN 2018</p> <p>LAYAR BELAKANG: Program Insentif Buku Ajar Terbet Perguruan Tinggi merupakan salah satu program yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Pengawasan Rice dan Peningkatan, Kementerian Rice, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2018. Program ini terbuka bagi dosen dari berbagai bidang ilmu yang telah meneliti buku ajar untuk perguruan tinggi yang ditunjukkan dari pengalaman penelitiannya.</p> <p>Tidak sedikit jumlah dosen Indonesia yang berpengalaman dalam menjalankan penelitian yang berhasil. Dosen yang mengikuti program penelitian telah mengeni <i>state of the art</i> dalam bidang keahliannya. Pengalamannya tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk menulis buku. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah buku yang ditulis dosen masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah/pengalaman penelitian yang sudah diterima perguruan tinggi.</p> <p>Program ini akan memberikan persiapan atau penelitian menulis buku, tetapi menyediakan scintalah dan insentif bagi penulis buku yang bukanya telah diterbitkan, baik oleh unit penelitian perguruan tinggi maupun penerbit komersial. Bagi para pemohon insentif, baik moral, baik kepenghargaan, dan reputasi tetap ada pada penulis.</p> <p>TUJUAN Program Insentif Buku Ajar Terbet Perguruan Tinggi bertujuan memacu para dosen untuk terus meneliti dan menuliskan hasil dan temuanannya. Maksudnya adalah buku ajar perguruan tinggi. Kegiatan seperti ini pada akhirnya akan meningkatkan publikasi ilmiah dalam bentuk buku untuk memperbaiki wawasan ilmiah dalam kegiatan meneliti dan mengajar seorang dosen, serta dapat menjadi sarana belajar atau pemahaman ilmu bagi para mahasiswa.</p> <p>BESARNYA INSENTIF Insentif yang diberikan selinggi anggaran Rp16.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap judul dipotong pajak 15%.</p> <p>KETENTUAN UMUM Kebijakan program insentif Program Insentif Buku Ajar Terbet tahun 2018 harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program ini terbuka bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK dan ID SINTA. 2. Pengusul (penulis, koauthor, dan atau penulis buku) yang dapat mengikuti program ini harus pernah menuliskan judul buku dan atau insentif buku pada publikasi ilmiah sebelumnya. 3. Buku ajar telah memiliki ISBN dan diterbitkan oleh penerbit yang berstatus internasional atau anggota BAP/APPPI. 4. Buku ajar terbet terbet 31 Desember 2018. 5. Program dan program tinggi yang sudah menandatangani data publikasi pada Aplikasi Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi pada http://portal.kemendiknas.go.id/kegiatan akan mendapat prioritas. <p><small>Panduan Pengajuan Usulan Insentif Buku Ajar Terbet 2018</small> 3</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 6. Judul buku yang diajukan belum pernah memperoleh insentif sejenis. 7. Buku yang diajukan bukan merupakan buku yang diterbitkan berdasarkan hasil dari hasil penelitian buku ajar, dan bukan buku hasil review yang pernah memperoleh insentif buku ajar terbet yang diselenggarakan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana APBN. 8. Kertas buku yang dapat digunakan untuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, kompendium, monograf, atau terjemahan penelitian yang dikumpulkan pada data dan informasi hasil penelitian yang diselenggarakan di Indonesia. Sebaliknya, buku manual teknik, pengajaran, program komputer, prilaku, jurnalistik, sastra, atau disiplin lain, dan laporan penelitian hasil dan terjemahan. 9. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) daftar tabel yang terbet dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) glossarium, (6) index. 10. Jumlah halaman kehi utama (tidak terbet) \geq 40 halaman. 	

Bapelkes Bait

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
			<p>6. Judul buku yang diajukan belum pernah menempelhi insentif sejenis.</p> <p>7. Buku yang diajukan bukan merupakan buku yang diterbitkan berdasarkan hasil dari hibah penelitian buku ajar, dan bukan buku hasil revisi yang pernah memperoleh insentif buku ajar terhi yang diselenggarakan oleh lembaga atau perguruan tinggi yang menggunakan sumber dana APBN.</p> <p>8. Jenis buku yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif adalah buku ajar, kompendium, monograf, atau pengayaan pembelajaran yang didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian yang diselenggarakan di Indonesia. <i>Sebaliknya</i>, buku manual untuk pengoperasian program komputer, petunjuk praktikum, bentuk asli skripsi/tesis/disertasi, dan laporan penelitian tidak akan dipertimbangkan.</p> <p>9. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan berisi: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar pustaka, (5) glossarium, (6) indeks.</p> <p>10. Jumlah halaman teks utama (batang tubuh) ≥ 49 halaman.</p> <p>11. Buku bukan hasil saduran/terjemahan dan bebas plagiarisme, serta merupakan karya asli pengusul (dibuktikan dengan surat pernyataan).</p> <p>12. Ukuran buku minimal A5 (14,8 cm x 21 cm).</p> <p>13. Jumlah buku yang diajukan sebanyak-banyaknya dua judul, tetapi hanya satu judul yang dapat diberi insentif.</p> <p>14. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.</p> <p>15. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</p> <p>MEKANISME PENGUSULAN DAN TAHAP PENILAIAN</p> <p>SELEKSI TAHAP PERTAMA</p> <p>Kelengkapan seleksi tahap pertama terdiri dari dua berkas, yaitu:</p> <p>A. BERKAS ADMINISTRASI PENGUSUL</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar dari institusi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (untuk universitas dan institusi oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala/Pengurus LPPM, atau polidinkam oleh Direktur, atau sekolah tinggi oleh Ketua) (Lampiran 1); Biodata penulis sesuai dengan format terlampir (Lampiran 2); Surat pernyataan dibubuhi meterai Rp6.000, yang antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none"> Pernyataan bahwa buku merupakan karya sendiri dan bebas plagiarisme; Pernyataan bahwa buku yang diusulkan sudah dimasukkan/diupload ke Portal SINTA: sinta2.ristekdikti.go.id; Pernyataan bahwa belum pernah mendapatkan hibah buku atau insentif buku pada tahun-selanjutnya. <p>Seluruh berkas administrasi pengusul pada nomor 1, 2 dan 3 dipindai (<i>scan</i>) menjadi satu berkas PDF yang diberi nama "NIDN-berkas-administrasi PDF".</p> <p>B. BERKAS BUKU LENGKAP</p> <p>Setiap pengusul harus membuat salinan lunak (<i>softcopy</i>) buku lengkap yang sudah diterbitkan dalam format pdf meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sampul buku; halaman yang berisi katalog dikam terbitan (meliputi Judul buku, Pengarang, Penerbit, ukuran buku, dan ISBN); daftar isi; seluruh isi buku; dan <p><small>Petuan Pengajuan Usulan Insentif Buku Ajar Tahun 2018</small></p>	

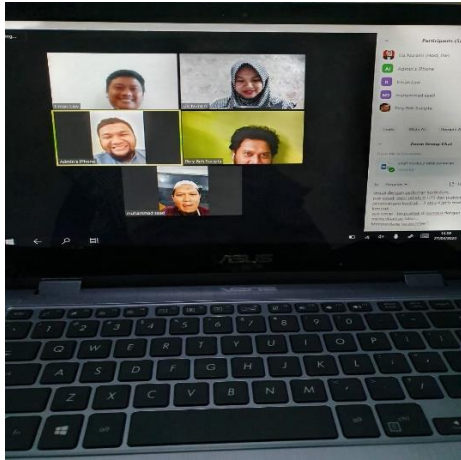
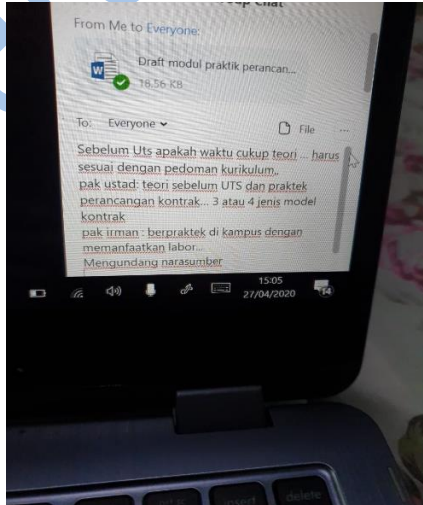
No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
2	Mengumpulkan literatur terkait terkait praktik perancangan kontrak di perpustakaan			31 Maret 2020- 03 April 2020


No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
3	Membuat peta konsep draf pembuatan modul praktik perancangan kontrak			21 April 2020

Lampiran Kegiatan 3


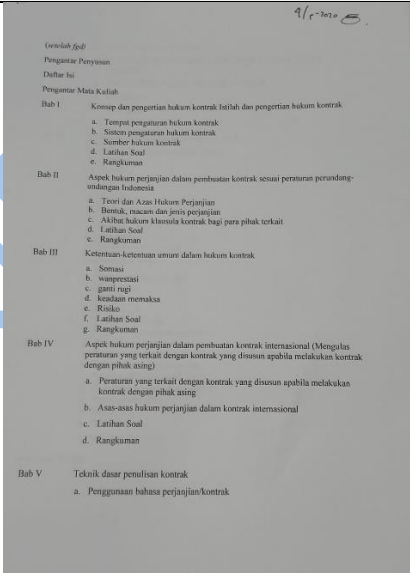
Judul Kegiatan : Melakukan audiensi dengan *stakeholders*

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
1	Mengundang rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak			20 dan 27 April 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
2	Melakukan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak			27 April 2020


No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
3	Membuat kesimpulan hasil FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak		<p style="text-align: center;">NOTULA</p> <p>Hari : Senin Tanggal : 27 April 2020 Pukul : 14.30 Kegiatan : Kegiatan FGD dengan rekan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak</p> <p>Pada kegiatan ini membahas tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta lanjut menyampaikan draf modul praktik perancangan kontrak 2. Tanggapan dari rekan dosen lainnya teori diselesaikan sebelum UTS & setelah UTS praktik membuat kontrak, pada saat melakukan pelatihan pembuatan kontrak kepada mahasiswa baiknya dosen menggunakan fasilitas labor yang telah disediakan dan mengundang narasumber yang sering berpraktik membuat perancangan kontrak agar mahasiswa mendapatkan ilmu tidak hanya teori namun pelaksanaannya juga. 3. Latihan soal juga harus lebih banyak kepada latihan pembuatan perancangan kontrak karena output yang diharapkan dari matakuliah ini bukan saja kemampuan teori tetapi juga kemahiran praktik mahasiswa dalam merancang kontrak. <p>Notulis,  Lia Nuraini, S.H.,M.H. NIP. 19900723 201903 2 015</p> <p style="text-align: right;">Dekan  Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H. NIP. 19810929 201504 1 002</p>	27 April 2020



Bapek

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
4.	Mengkonsultasikan kepada atasan hasil draf modul praktik perancangan kontrak			4 Mei 2020

Lampiran Kegiatan 4

Judul Kegiatan : Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak


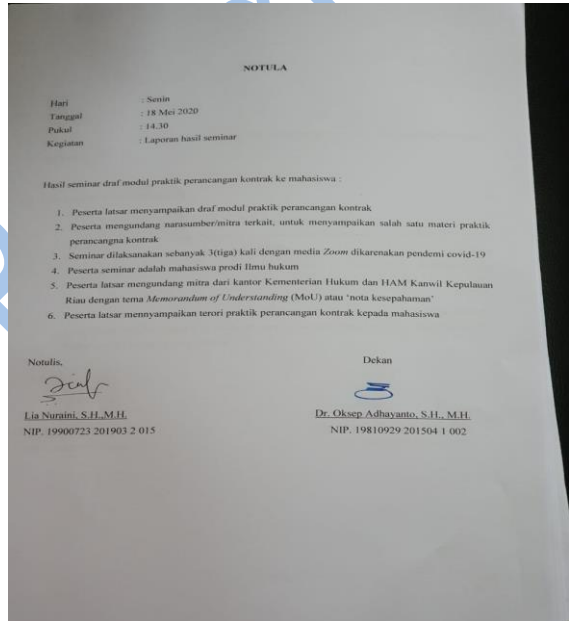


No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
1	Pelaksanaan seminar modul praktik perancangan kontrak			13-15 Mei 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
			  <p>NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU</p> <p>NOMOR: B-2109/Ew.32.4/JJ.00/02/2020 NOMOR: W.32.GR.06.01-1121</p> <p>TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Batam, yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km. 14, Senggaran, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. AGUS WIDJAJA, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja - Km. 14, Senggaran, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. <p>Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berkedudukan di Provinsi 	

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
2	Pelaksanaan Seminar			13 - 15 Mei 2020


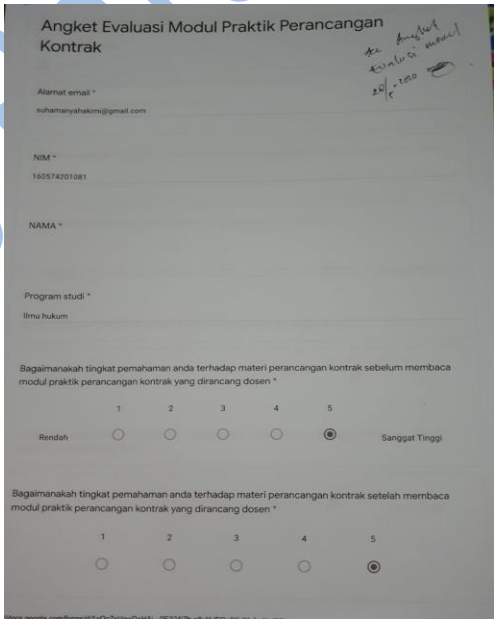
Bapelkes D

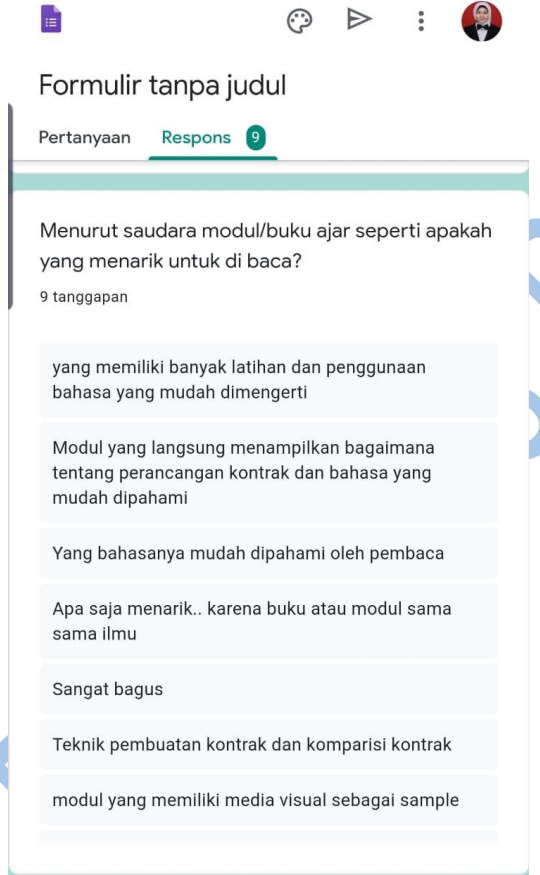
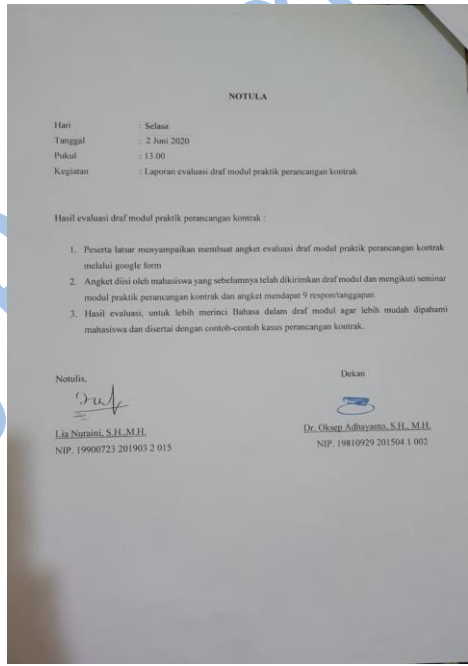
No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
				

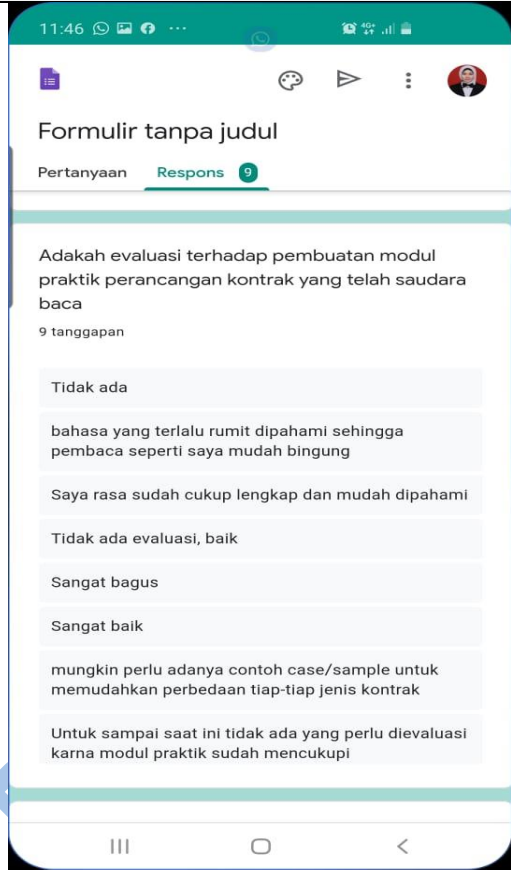
No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
4.	Membuat laporan hasil pelaksanaan seminar dan menyampaikan ke atasan		 <p style="text-align: center;">NOTULA</p> <p>Hari : Senin Tanggal : 18 Mei 2020 Pukul : 14.30 Kegiatan : Laporan hasil seminar</p> <p>Hasil seminar draf modul praktik perancangan kontrak ke mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta latsar menyampaikan draf modul praktik perancangan kontrak 2. Peserta mengundang narasumber/mitra terkait, untuk menyampaikan salah satu materi praktik perancangan kontrak 3. Seminar dilaksanakan sebanyak 3(tiga) kali dengan media <i>Zoom</i> dikarenakan pandemi covid-19 4. Peserta seminar adalah mahasiswa prodi Ilmu Hukum 5. Peserta latsar mengundang mitra dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepulauan Riau dengan tema <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> atau 'nota kesepahaman' 6. Peserta latsar menyampaikan terori praktik perancangan kontrak kepada mahasiswa <p>Notulis,  Lia Nuraini, S.H., M.H. NIP. 19900723 201903 2 015</p> <p>Dekan  Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. NIP. 19810929 201504 1 002</p>	18 Mei 2020


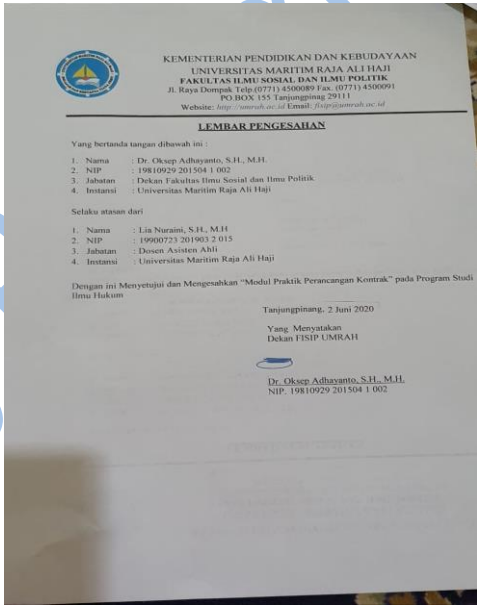
Lampiran Kegiatan 5

Judul Kegiatan : Evaluasi modul praktik perancangan kontrak

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
1	Membuat angket untuk evaluasi modul praktik perancangan kontrak			28 Mei 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
2	Membuat evaluasi modul praktik perancangan kontrak			2 Juni 2020

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
				

No	TAHAPAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN
		OUTPUT PROSES	OUTPUT HASIL	
3	Melakukan pelaporan kepada atasan tentang evaluasi modul praktik perancangan kontrak			2 Juni 2020



BAPELKES BATAM
“A Great Place To Learn And Grow”